**PELAKSANAAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA
DALAM MENGENDALIKAN TINGGINYA TINGKAT
PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI
PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2019**

Imeldalius

Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Riau

Jl. Azki Aris, Rengat, Kode Post 29318, Telp. (0769)22458

Abstract

Marriage is a spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Godhead and divorce is something that is hated by God, although it is permissible, for that the role of the court Religion is very important in reducing the high divorce rate, because the Religious Courts through Judges can carry out the principle of divorce making it difficult and seek parties to carry out mediation in advance so that divorce does not occur so that the households of those who wish to divorce can be saved.

Keywords : Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama, Azas Mempersulit Perceraian, Perkawinan, Perceraian

PENDAHULUAN

Perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam realita kehidupan manusia, dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-istri), mereka saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi, insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah disebut “keluarga”.¹

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa perkawinan

yang sah itu dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Selain itu juga harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal tersebut diatas, maka pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing merupakan syarat mutlak untuk mencantumkan sah tidaknya suatu perkawinan. Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan Undang-undang dan penjelsannya tersebut, berarti bahwa aturan-aturan tentang perkawinan yang telah menjadi hukum tersendiri di dalam beberapa agama tetap tidak kehilangan eksistensinya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan atau dinyatakan lain dalam undang-undang.³

Dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan : “Undang-undang

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 1

² Ibid, hlm. 268

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 2

memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, perkawinan hanya sah dan dianggap mempunyai kekuatan hukum bila dapat dibuktikan dengan adanya suatu akta perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil.⁴

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, penyebab putusnya perkawinan bisa karena kematian, perceraian, atau karena adanya keputusan pengadilan. Dalam Pasal 39 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁵

Banyak alasan yang membuat perkawinan mereka menjadi tidak harmonis, bahkan seringkali

berujung pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Karena pertengkaran yang terus menerus dan suasana yang dianggap sudah tidak ada kenyamanan lagi untuk pasangan suami istri tersebut maka banyak pasangan suami istri yang mengambil keputusan untuk berpisah atau bercerai.

Diwilayah Pengadilan Agama Rengat masih tergolong tingginya tingkat perceraian, sehingga pentingnya peran Pengadilan Agama dalam menerapkan azas-azas mempersulit perceraian, karena perceraian adalah salah satu perbuatan yang dibenci Allah. SWT meskipun dibolehkan menurut hukum islam dan hukum positif.

Berdasarkan latar belakang tersebutlah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pelaksanaan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Mengendalikan Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Rengat”**. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Mengendalikan Tingginya Tingkat Perceraian Di

⁴ Ibid, hlm. 267

⁵ Ibid, hlm. 400

Pengadilan Agama Rengat? Dan Apakah Faktor Penghambat Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Fungsi Pengadilan Agama?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengadilan agama dalam mengendalikan tingginya tingkat perceraian di pengadilan agama rengat
2. Untuk mengetahui apakah faktor penghambat pengadilan agama dalam melaksanakan fungsi pengadilan agama.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Untuk penerapan Ilmu yang sudah dipelajari/ merupakan hasil implementasi ilmu yang diperoleh penulis dibangku kuliah terhadap kenyataan dilapangan yang telah terjadi.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan

informasi dan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan strategi dan kebijakan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.

Pelaksanaan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Mengendalikan Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Rengat

Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) UUP mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.

1. Pengertian Perceraian

Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/1975. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai

menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerahhukumnya mewilayahitempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat (2) KHI).

Sedangkan, cerai karena talak dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi

karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”

Yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Jadi, talak yang diakui secara hukum Negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama.

Sedangkan, mengenai cerai karena talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama, menurut Ketua Pengadilan Agama Rengat Bapak

Drs. Muhdi Kholil, SH., MA., M.M “akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di Negara Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama, akibat dari talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum”. “Meskipun suami sudah mengucapkan talak diluar Pengadilan, pihak Pengadilan Agama tetap melakukan mediasi agar para pihak yang ingin bercerai bisa rujuk kembali dan membeina rumah tangga dengan baik” sambung Ketua Pengadilan Agama Rengat.

Selain itu, Pasal 115 KHI mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dengan demikian, dari penjelasan mengenai cerai karena gugatan dan cerai karena talak sebagaimana yang dimaksud dalam KHI yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa keduanya hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses siding

di Pengadilan Agama. Namun, tidak mudah untuk menggugat ataupun memohon cerai ke pengadilan. Harus ada alasan-alasan yang cukup menurut hukum, sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan Pengadilan.

Alasan-alasan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun

atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Suami melanggar taklik-talak;
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dengan kata lain, hakim tidak akan mengabulkan gugatan cerai di luar alasan-alasan di atas.

Pelaksanaan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Mengendalikan Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Rengat

Peengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam yang tugas pokoknya, sebagaimana diatur dalam pasal 49 (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang berbunyi : *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang : Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.*⁶

Pengadilan Agama dalam mengimplementasi tugas dan

⁶ Amandemen Undang-undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, hlm. 18

fungainya dalam mengurangi tingginya tingkat perceraian, maka Pengadilan Agama sesuai yang diamanatkan UU maka Pengadilan Agama Rengat menerapkan azas mempersulit perceraian.

Penerapannya melalui usaha Hakim dalam mendamaikan para pihak yaitu melalui mediasi yang difasilitasi dan dibantu oleh pihak Pengadilan Agama dalam mendamaikan atau membuat para pihak untuk tidak bercerai, selain itu juga perceraian dapat diterima dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan. Hal ini terkandung dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Hakim wajib mengupayakan perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mereka dapat kembali dalam suasana rukun dan damai. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Rengat Bapak Drs. Muhdi Kholil, SH., M.A., M.M bahwa, sebagai bentuk dan wujud dari penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian yaitu adanya usaha Pengadilan Agama untuk

mendamaikan kedua belah pihak dengan cara mempertemukan para pihak untuk mediasi.

Ketua Pengadilan Agama Rengat Bapak Drs. Muhdi Kholil, SH., M.A., M.M juga menyampaikan bahwa selain upaya yang dilakukan Hakim untuk mendamaikan para pihak, Hakim juga harus betul-betul mempertimbangkan terkait alasan perceraian yang diajukan oleh para pihak. Alasan-alasan tersebut sebagaimana juga telah diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 166 Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu acuan atau dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian. Alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Perceraian karena suami atau istri melalaikan kewajiban;
- b) Perceraian karena suami atau istri berbuat zina atau pembeda, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- c) Perceraian karena suami atau istri meninggalkan suami atau istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;
- d) Perceraian karena suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih;
- e) Perceraian karena suami atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- f) Perceraian karena cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- g) Perceraian karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran (syiqa’);
- h) Perceraian karena suami atau istri murtad (keluar dari agama islam);

Untuk mengetahui kebenaran alasan yang diajukan saat permohonan cerai maupun gugatan cerai maka dalam prosedur atau pada tahap pemeriksaan atau pembuktian diberikan kesempatan yang sama untuk kedua belah pihak untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa saksi-saksi maupun bukti

surat. Alasan-alasan perceraian tersebut diatas merupakan faktor penyebab yang mendasari gugatan perceraian, berdasarkan hasil data yang didapat dari Pengadilan Agama Rengat bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian yang paling dominan adalah karena terjadi pertengkaran secara terus menerus. Selain itu, dikarenakan faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan terjadinya perselingkuhan.

Selain itu dapat dilihat bahwa Pelaksanaan Fungsi Pengadilan Agama dalam mempersulit perceraian dapat menyatukan keluarga yang ingin berpisah dan selain itu juga dapat mengurangi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat.

Tabel Tingkat Perceraian Selama 3 (tiga) Tahun

No	Tahun	Cerai Talak	Cera i Gugat	Jumlah
1	2017	284	733	1017
2	2018	290	688	978
3	2019	184	494	678

Sumber : Data Pengadilan Agama Rengat

Dalam pelaksanaannya perceraian dibedakan menjadi dua yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat diajukan ke Pengadilan oleh pihak istri, sedangkan cerai talak diajukan oleh pihak suami ke Pengadilan dengan memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya dengan alasan seperti yang telah disebutkan di atas. Sedangkan untuk tata caranya untuk cerai talak dan cerai gugat diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 86 Undang- undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam proses penyelesaian perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahapan-tahapan yang dimaksud yaitu mulai tahapan ketika perkara terdaftar di kepaniteraan dan tahapan ketika perkara itu disidangkan.

Adapun tahap-tahap pemeriksaan tentang suatu perkara sejak ia terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama sampai dengan perkara itu disidangkan, adalah perkara terdaftar di Kepaniteraan, panitera melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara, penelitian tersebut disertai dengan membuat resume tentang

kelengkapan berkas perkara, lalu berkas perkara serta resume tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan (dengan buku ekspedisi lokal sebenarnya) dengan disertai “saran tindak”, misalnya berbunyi “syarat- syarat lengkap dan siap untuk disidangkan”.

Berdasarkan resume dan saran tersebut, Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan Majelis Hakim (PMH) untuk memeriksa perkara tersebut, terkadang sekaligus dengan panitera sidangnya, atau jika panitera sidang ini tidak sekaligus ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama dalam PMH, nantinya dapat ditunjuk oleh ketua majelis.

Selanjutnya berkas perkara beserta penetapan Majelis Hakim diserahkan kepada Hakim ketua yang ditunjuk (sebaiknya dengan buku ekspedisi lokal juga) untuk dipelajarinya. Berdasarkan PMH tersebut, ketua majelis mengeluarkan Penetapan Hari Sidang (PHS) yakni menetapkan kapan hari, tanggal, dan waktu sidang pertama akan dimulai.

Kemudian setelah ditetapkan PHS, maka petugas panggil yaitu juru sita atau juru sita pengganti atau

pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan agama akan memanggil pihak-pihak ke muka sidang menurut hari, tanggal, jam dan tempat yang telah ditentukan PHS.⁷

Sedangkan tahap-tahap pemeriksaan suatu perkara dipersidangan di Pengadilan Agama Rengat, berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di Pengadilan Agama Rengat adalah sebagai berikut:⁶

Pertama, setelah membuka persidangan dan terbuka untuk umum, Hakim menanyakan identitas kedua belah pihak, kemudian sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka Hakim mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa. Dalam upaya perdamaian yang pertama ini, Hakim menasehati para pihak menggunakan pendekatan keagamaan terlebih dahulu, atau psikologis anak (jika kedua belah pihak telah memiliki anak), serta mengingatkan akibat yang akan dialami oleh para pihak apabila perceraian itu benar terjadi.

Upaya perdamaian yang

dilakukan oleh Hakim tidak hanya dilakukan pada sidang pertama saja, namun harus tetap dilakukan pada setiap persidangan. Pada pelaksanaannya, hal ini memang dilakukan oleh para Hakim, namun tampak hanya memenuhi ketentuan formal saja. Yaitu pada sidang-sidang selanjutnya upaya perdamaian yang dilakukan Hakim hanya sekedar menanyakan apakah ada hasil perdamaian atau tidak, yakni setelah para pihak menempuh mediasi atau setelah penundaan persidangan. Jika ternyata tidak ada hasil perdamaian, maka Hakim pun segera melanjutkan persidangan.

Kedua, jika dalam upaya perdamaian pada sidang pertama tidak berhasil, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Mediasi, maka Hakim Ketua memerintahkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu dan hal ini harus dilakukan oleh para pihak sebelum perkaranya dilanjutkan. Untuk mediatornya dipilih oleh Hakim Ketua dengan menunjuk salah satu Hakim di Pengadilan Agama Depok atau boleh dipilih oleh para pihak.

Dalam proses mediasi ini

⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persda, 2002, Cet.Ke-9, hlm. 129

para pihak diharuskan datang secara pribadi atau boleh didampingi oleh kuasanya. Namun jika dianggap perlu, maka mediator bisa memintakan kepada kuasa hukum masing-masing untuk tidak mengikuti proses mediasi.⁶² Kemudian jika dalam proses mediasi ada salah satu pihak yang tidak hadir, maka upaya mediasi tersebut tidak dilakukan dan ditunda sampai kedua belah pihak yang bersengketa hadir. Hal ini dilakukan agar upaya mediasi mendapatkan hasil yang maksimal.

Ketiga, jika upaya mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil juga, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda Pembacaan permohonan/gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian dan Kesimpulan. Dan dalam proses replik- duplik sebelum pembuktian, Termohon dapat mengajukan Rekonvensi (Gugatan balik) (Pasal 132a HIR, 158 R.Bg.)

Keempat, musyawarah majelis hakim. Musyawarah majelis hakim ini dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum. Semua pihak maupun hadirin disuruh meninggalkan ruangan sidang. Panitera sendiri, kehadirannya dalam musyawarah

majelis adalah atas izin majelis. Hasil musyawarah majelis ditandatangani oleh semua Hakim dan ini merupakan lampiran berita acara sidang yang nanti akan dituangkan ke dalam diktum keputusan.

Kelima, Pengucapan keputusan. Pengucapan keputusan selalu dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah selesai keputusan diucapkan, ketua majelis bertanya kepada pihak penggugat atau tergugat, apakah keputusan tersebut diterima atau tidak. Bagi pihak yang menerima, maka baginya tertutup upaya untuk melakukan banding. Sedangkan bagi pihak yang merasa tidak puas, maka baginya masih terbuka untuk melakukan upaya hukum.

Berdasarkan pengamatan penulis, semua langkah-langkah yang telah ditentukan dalam hukum acara sudah dilakukan dengan baik oleh para Hakim di Pengadilan Agama Depok, mulai dari proses penerimaan perkara, kemudian tata cara persidangan serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh para Hakim. Namun demikian, penulis melihat para pihak yang berperkara terlihat tetap bersikeras untuk mempertahankan

pendiriannya sehingga banyak perkara yang tetap berakhir dengan perceraian.

Proses perdamaian yang dilaksanakan oleh Hakim memang bersifat tidak ada paksaan, para pihak dapat melakukan perdamaian atas dasar kesepakatan antara keduanya dan juga atas dasar suka rela “mau sama mau”.⁶³ Jika memang para pihak tetap bersikeras untuk tetap pada pendiriannya, maka Hakim tidak dapat memaksakannya untuk melakukan perdamaian. Namun, upaya mendamaikan tetap harus dilakukan selama proses pemeriksaan berlangsung, karena selama perkara belum diputus tetap melekat kewajiban kepada para Hakim untuk mendamaikan. Bahkan pada saat terakhir persidangan sebelum Hakim menjatuhkan putusan, masih melekat pada dirinya fungsi Hakim dalam usaha mendamaikan.

Drs. Sarnoto, M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Depok, mengatakan,⁶⁴ salah satu kendala yang dihadapi oleh para hakim Pengadilan Agama Depok dalam upaya mendamaikan para pihak adalah kerasnya kemauan para pihak atau salah satu pihak untuk

melakukan perceraian. Sehingga para Hakim akan sangat sulit untuk mengupayakan perdamaian kepada mereka. Mengingat jika pasangan suami istri itu tetap dipaksakan untuk mempertahankan hubungan perkawinannya, maka akan lebih berdampak negatif bagi keduanya.

Apabila memang kedua belah pihak sudah sangat sulit untuk disatukan, dan upaya yang dilakukan pun selalu menemui kebuntuan, maka Hakim akan menjadikan perceraian sebagai solusi yang terbaik untuk mereka. Meskipun Islam mewajibkan para penganutnya untuk menjaga dan memelihara keutuhan dan kelanggengan akad nikah, tapi jika kondisi rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan keseimbangannya, maka Islam membolehkan terjadinya perceraian.

Namun untuk mencapai kesimpulan tersebut, yaitu rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan keseimbangannya, maka terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan serta pembuktian, dan di sinilah salah satu fungsi dari Pengadilan Agama khususnya Hakim yaitu untuk memeriksa dan

membuktikan bahwa seandainya perceraian itu terjadi adalah memang merupakan keharusan, bukan dilakukan karena kehendak nafsu semata.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Depok, yaitu bapak Drs. Sarnoto, M.H. beliau mengatakan alasan-alasan para pihak yang merupakan faktor pengajuannya gugatan cerai adalah perselisihan terus-menerus, tidak adanya tanggung jawab, karena tekanan ekonomi, cemburu, adanya pihak ketiga, dll. Kemudian beliau menambahkan dari beberapa faktor tersebut, yang menjadi masalah utamanya adalah ketidaksiapan atau kurang matangnya para pihak untuk menjalani kehidupan berumah tangga, yang membuat mereka tidak siap dalam menghadapi tantangan hidup berumah tangga.⁶⁵

Penutup

Pengadilan Agama dalam mengimplementasi tugas dan fungsinya dalam mengurangi tingginya tingkat perceraian, maka Pengadilan Agama sesuai yang diamanatkan UU maka Pengadilan

Agama Rengat menerapkan azas mempersulit perceraian.

Penerapannya melalui usaha Hakim dalam mendamaikan para pihak yaitu melalui mediasi yang difasilitasi dan dibantu oleh pihak Pengadilan Agama dalam mendamaikan atau membuat para pihak untuk tidak bercerai, selain itu juga perceraian dapat diterima dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan. Hal ini terkandung dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Hakim wajib mengupayakan perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mereka dapat kembali dalam suasana rukun dan damai. Berdasarkan pendapat Ketua Pengadilan Agama Rengat Bapak Drs. Muhdi Kholil, SH., M.A., M.M mengatakan bahwa, sebagai bentuk dan wujud dari penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian yaitu adanya usaha Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara mempertemukan para pihak untuk mediasi.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku-buku**

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2006
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2007
- H. Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- R. Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Pt. Intermedia, Jakarta: 2005
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Satri Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2010
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Wahyu Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)